

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Partisipasi Organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dalam Pemenuhan Perlindungan Hak Disabilitas dari Bencana Covid-19 di DKI Jakarta” menunjukkan bahwa, signifikansi partisipasi pemenuhan hak penyandang disabilitas selama pandemi Covid-19 di DKI Jakarta dilakukan HWDI Jakarta meliputi identifikasi identitas penyandang disabilitas dan akses disabilitas terhadap permasalahan utama Covid-19 yakni akses informasi kebencanaan Covid-19, akses fasilitas kesehatan dan akses bantuan sosial dan jaminan sosial. Respons Pemprov DKI Jakarta mengenai partisipasi HWDI dengan strategi afirmasi diberikan pengakuan dan apresiasi juga membawa isu disabilitas selama Covid-19 semakin menjadi isu sentral.

Analisis kewargaan Stokke memberikan pemetaan identitas kewargaan penyandang disabilitas selama pandemi Covid-19. Hasil analisis memberikan implikasi pada dimensi kewargaan sebagai keanggotaan, legal hukum dan partisipasi disabilitas sudah dalam tahap penerimaan sosial, pelayanan publik dan kebijakan. Dimensi hak peneliti menemukan catatan dalam hak politik adalah kelompok disabilitas belum bisa merepresentasikan dirinya secara luas dalam urusan publik pada pelibatan bencana Covid. Hak sosial memiliki implikasi pada kesejahteraan sehingga catatan mengenai bansos dan jaminan sosial menunjukkan belum terwujudnya hak sosial pada penyandang disabilitas. Hak sipil belum terpenuhi dari segi keamanan individu penyandang disabilitas. Covid-19 mengancam keselamatan individu penyandang disabilitas dan diskriminasi disabilitas rasakan kebijakan PSBB. Identitas kewargaan disabilitas belum mencapai *full citizenship* karena dalam dimensi hak, hak sosial, sipil, dan politik belum terpenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta selama Covid-19.

Partisipasi kewargaan inklusif HWDI memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas selama bencana Covid-19 dengan menggunakan empat nilai kewargaan inklusif Lister. Pertama, pengakuan berarti hak disabilitas diakui

dan diakomodir, HWDI mengandeng LSM , lembaga advokasi dan pemerintah dalam bentuk kolaborasi untuk memastikan hak perlindungan dari bencana terlaksana. Kedua, keadilan bagi disabilitas terwujud dengan penentuan nasib sendiri (*self-determinism*) dan berdaya (*self development*) melalui pemberdayaan HWDI dengan bentuk pelatihan bencana dan ekonomi. Ketiga, poin untuk mengukur determinasi diri penyandang disabilitas yakni : Keterlibatan dalam penanggulangan bencana Covid-19, kompensasi seimbang, rasa aman, dan kesejahteraan. Partisipasi HWDI sudah menyasar hampir semua poin keterlibatan HWDI baik secara langsung dan daring membuahkan beberapa respon positif terkait pemenuhan perlindungan hak disabilitas dari bencana oleh pemprov DKI Jakarta. Keempat, HWDI memperjuangkan hak disabilitas saat bencana Covid-19 juga menunjukkan perluasan solidaritas masyarakat sipil dari komunitas disabilitas dan pemerintah dengan bentuk koalisi atau kolaborasi.

6.2 Saran

Melaui temuan hasil dan analisis data peneliti memberikan saran secara praktis dan saran teori sebagai berikut :

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran praktis berupa :

- a) Pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu membuka ruang partisipasi kebencanaan inklusif bagi organisasi penyandang disabilitas secara luas. Ruang partisipasi berguna untuk mastikan bekerjanya proses partisipasi organisasi disabilitas termasuk soal penanggulangan bencana Covid-19.
- b) Komitmen penuh pemerintah indonesia baik pusat maupun daerah untuk mengakui hak penyandang disabilitas. Pengakuan identitas disabilitas melalui identifikasi kewargaan membantu disabilitas mendapatkan hak kewargaan saat Covid-19 berupa bantuan sosial dan jaminan sosial karena telah terkonfirmasi sebagai penerima hak tersebut.

- c) Organisasi HWDI perlu menjaga solidaritas penyandang disabilitas lebih luas lagi dengan melibatkan masyarakat sipil dalam aksi dan kampanye mempengaruhi isu disabilitas menjadi wacana publik.

6.2.2 Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran teoritis yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya, yakni :

- a) Hasil penelitian ini berpotensi untuk dikembangkan ke dalam partisipasi organisasi penyandang disabilitas secara makro untuk melihat lebih luas bagaimana organisasi penyandang disabilitas HWDI melakukan proses mempengaruhi pemerintah dalam kondisi selain bencana Covid-19. Misalnya dalam mempengaruhi pemerintah dalam isu disabilitas lain seperti: pendidikan, pekerjaan, keterwakilan politik dan lain sebagainya.
- b) Penggunaan perspektif kewargaan masih dapat digunakan dalam membedah isu disabilitas maupun isu serupa sepanjang diiringi dengan pemilihan konsep yang tepat.